

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016), keluarga diartikan sebagai unit terkecil yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa individu yang tinggal di bawah satu atap dalam keadaan yang saling bergantung satu sama lain. Puspitawati (2012) menjelaskan keluarga sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang menjadi dasar bagi semua institusi. Keluarga juga bisa diartikan sebagai kelompok utama yang terdiri dari dua orang atau lebih, dengan interaksi interpersonal, hubungan darah, ikatan perkawinan, dan adopsi. Definisi ini menunjukkan bahwa keluarga melibatkan ikatan perkawinan, hubungan darah, dan adopsi sebagai pengikat. Semua anggota keluarga diharapkan tinggal bersama di bawah satu atap. Selain itu, dalam pandangan ini, kepala keluarga selalu mengacu pada suami atau ayah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks ini, keluarga juga dianggap sebagai kesatuan hubungan dan komunikasi, yang tercermin dalam peran semua anggota keluarga seperti suami-istri, orangtua-anak, dan antar-saudara. Melalui interaksi dan komunikasi ini, keluarga memiliki peran penting dalam mempertahankan budaya bersama, sebagaimana dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974.

Disamping definisi keluarga itu sendiri, tentunya ada yang dikatakan dengan keluarga ideal. Bisa dikatakan keluarga ideal apabila sudah terpenuhinya tiga unsur pokok, yaitu sandang, pangan dan papan. Adapun menurut Prof. Dr. H. Kamrani Buseri juga mengemukakan dalam artikel yang ditulis oleh Oleh. Hj. Hamida Olfah bahwa keluarga Ideal itu adalah keluarga yang dapat mengantarkan seluruh isi keluarga itu mencapai hidup bahagia dan sejahtera dalam segala segi, baik segi fisik, material, rohani, spiritual serta dunia dan ukhrawi. Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga yang ideal itu keluarga yang mampu terpenuhi segala kebutuhannya dari berbagai aspek.

Kehadiran keluarga yang tidak mampu mandiri dalam menjalani kehidupannya, maka hal ini menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Ketika keluarga tidak mampu untuk mengatasi situasi ini, maka dapat berakibat pada timbulnya kemiskinan dalam masyarakat. Penting untuk diingat bahwa kemiskinan dalam masyarakat bisa menjadi faktor yang menghambat tingkat kesejahteraan umum, dan hal ini terkadang tidak disadari oleh banyak orang.

Isu kemiskinan di Indonesia telah lama menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan dan program khusus. Dalam upaya untuk lebih efektif menangani kemiskinan, pemerintah Indonesia mulai sejak tahun 2007 meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), yang diatur dalam

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal ini menyebutkan bahwa perlindungan sosial adalah segala upaya untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Secara lebih luas, perlindungan sosial mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama bagi kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh risiko, serta untuk meningkatkan status sosial dan hak-hak kelompok marginal di setiap negara.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin. Fokus utama PKH adalah mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, dimana kriteria KPM PKH adalah memiliki anak balita hingga anak SMA, ibu hamil dan menyusui, serta lansia. Tujuan kebijakan pemerintah dalam meluncurkan PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sehingga meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam jangka pendek dan menghentikan siklus kemiskinan dalam jangka panjang. Secara khusus, program ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH, meningkatkan kualitas kesehatan, serta meningkatkan pendidikan anak-anak peserta PKH. Selain itu, PKH juga bertujuan untuk mengubah sikap positif peserta terhadap pentingnya

layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan bahwa taraf kehidupan sosial tetap terjaga.

Dalam penelitian ini, bahwa proses penyaluran PKH memerlukan seorang pendamping yang melaksanakan tugas dan fungsi Pendamping. Pendamping PKH memiliki peran dan kapasitas penting dalam menjaga kelancaran program-program terkait PKH. Tugas pendamping tidak hanya sebatas memastikan pendistribusian bantuan kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan aspek yang lebih mendalam. Mereka bertanggung jawab untuk secara efektif menyampaikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat dari bantuan tersebut.

Selain itu, pendamping PKH memiliki peran dalam memfasilitasi transmisi pengetahuan mengenai sikap orang lain, serta menciptakan rasa saling percaya di antara anggota masyarakat. Mereka berperan sebagai mediator atau penghubung yang mengkomunikasikan informasi, baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Pendamping PKH memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam mendukung keberhasilan program. Mereka harus mampu mengedukasi masyarakat tentang manfaat program, membangun kepercayaan di antara warga, dan menjembatani aliran informasi antara berbagai pihak terkait. Dalam hal ini, peran mereka sangat penting untuk memastikan kesuksesan dan dampak positif dari program PKH.

Adapun kegiatan PKH yang terjadi pada Desa Sinargalih yaitu dengan membentuk kelompok, yang mana setiap kelompok terdapat ketua didalamnya, kemudian mengadakan pertemuan serta diskusi rutin dalam waktu satu bulan sekali yang didampingi oleh pendamping PKH, dalam pertemuan tersebut membahas perihal komitmen para peserta PKH yang sudah difasilitasi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu juga dalam pertemuan ini sekaligus melakukan pengecekan kembali data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ditakutkan terdapat kesalahan penulisan data, yang mana nantinya akan mengakibatkan tidak lancarnya proses pencairan bahkan akibat fatalnya tidak dapat menerima bantuan PKH lagi.

Permasalahan yang muncul di lapangan saat mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) seringkali terkait dengan reaksi masyarakat terhadap tuntutan atau mekanisme yang harus diikuti. Beberapa permasalahan umum yang dapat timbul dalam pengimplementasian ini adalah kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, perubahan budaya dan kebiasaan, dan kondisi ekonomi dan lingkungan. Contoh permasalahan lainnya adalah ketika harus mengikuti agenda rapat, masih ada saja sebagian KPM yang tidak hadir. Kemudian yang kerap terjadi juga adalah terdapat protes-protes yang dilayangkan oleh masyarakat pada pendamping PKH bahwasanya kenapa mereka tidak menerima bantuan tersebut, padahal mereka juga merasa layak untuk mendapatkan mamfaat

bantuan PKH ini. Selain itu juga, permasalahan yang terjadi pada KPM adalah tidak keluarnya bantuan yg seharusnya mereka dapatkan.

Pendamping sosial dalam PKH menjadi peran penting terhadap kesuksesan program ini. Pendamping mempunyai banyak peran, yakni sebagai pemberi masukan positif, peningkatan pengalaman dan pengetahuan, pemberi informasi, mendorong kesadaran dan potensi, pembinaan dan pemantauan, perwakilan masyarakat, memastikan bantuan tepat sasaran, pengelola pengaduan masyarakat dan agen perubahan sosial. Dengan demikian, pendamping sosial PKH memiliki peran yang sangat kompleks dan krusial dalam menjalankan program ini dengan efektif, memberikan manfaat yang signifikan bagi KPM, dan berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat. Maka dari itu peran pekerja sosial lebih tepatnya pendamping sangat dibutuhkan dalam program PKH, yang mana biasanya disebut dengan pendamping sosial PKH.

Bedasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Peran Pendamping Sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Deskriptif di Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas dan fungsi pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana proses pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana hasil pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tugas dan fungsi pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui proses pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui hasil hasil pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan mengenai masalah kemiskinan serta kondisi masyarakat yang sebenarnya dan sebagai pengukuran sejauh mana keefektifan program dan pekerja sosial yang dikeluarkan pemerintah bagi penerima KPM.

2. Secara praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan dan bahan informasi perihal peran pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu juga hasil penelitian ini bisa menjadikan gambaran tugas bagi para pekerja sosial atau seorang pendamping, fasilitator masyarakat untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi masyarakat miskin. Sekaligus untuk lebih membenahi lagi peran yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendamping dan dengan hasil penelitian ini bisa menjadi sebuah pengukuran keberhasilan kinerja seorang pekerja sosial atau pendamping.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih detail, peneliti berusaha melakukan kajian terhadap beberapa pustaka ataupun karya lainnya yang relevan dengan topik penulisan karya ilmiah ini. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Adyatma Fauzan S pada tahun 2019 dalam judul “Peran Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Dusun Peanornor Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli”, memberikan kontribusi penting dalam memahami peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Dusun Peanornor Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan beberapa temuan yang berkaitan dengan peran PKH dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat miskin. Dalam bidang Pendidikan, KPM PKH di Dusun Peanornor Desa Simasom Toruan mengalami bantuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, sehingga siswa-siswa miskin tidak perlu bekerja setelah pulang sekolah. Hal ini mengindikasikan adanya dampak positif dari PKH terhadap akses pendidikan anak-anak miskin. Kemudian dalam bidang kesehatan, KPM yang memiliki balita dan bayi secara lebih rutin memeriksakan kesehatan mereka. Namun, ada juga catatan bahwa dalam beberapa

kasus, kesadaran terhadap kesehatan masih perlu ditingkatkan di kalangan KPM lainnya. Terakhir bidang pendapatan keluarga, dalam penelitian ini bahwa PKH belum memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin di Dusun Peanornor. Salah satu faktor yang dikemukakan adalah ketiadaan Usaha Bersama yang diinisiasi oleh PKH di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada aspek yang perlu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data yang meliputi reduksi data, triangulasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah sembilan orang. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Adyatma Fauzan S memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Dusun Peanornor Desa Simasom Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli, serta memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan terkait.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ana Ni'matul Izza pada tahun 2019 dalam judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal)” memiliki fokus yang relevan dengan permasalahan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat

di Desa Wonodadi, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dan menganalisis dampak dari program PKH terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori modal sosial yang meliputi tiga aspek, yaitu trust (kepercayaan), arus informasi, dan norma-norma yang mengikat. Teori ini digunakan untuk memahami dinamika pelaksanaan program dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan mekanisme pelaksanaan PKH di Desa Wonodadi, termasuk penetapan bantuan, pertemuan awal dengan penerima PKH, komponen bantuan PKH, penyajian bantuan, dan pembentukan kelompok. Ini menggambarkan proses yang terlibat dalam pelaksanaan program di tingkat masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat penerima PKH, termasuk manfaat sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Cut Razi Mirsandi yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam

Memberikan Perlindungan Sosial pada Masyarakat (Studi di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Penelitian ini membahas implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat di Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga ingin menganalisis bagaimana implementasi PKH dalam memberikan perlindungan sosial dan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini memberikan dampak positif dengan memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Implementasi PKH di Kecamatan Setia melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pertemuan awal dengan penerima manfaat, pengumpulan dan pemasukan data ke dalam sistem informasi manajemen, pembayaran bantuan, hingga tahap

verifikasi komitmen. Ini menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam menjalankan program.

Dilihat dari hasil penelitian ke tiga di atas, bahwa penelitian yang akan saya lakukan sangatlah berbeda. Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah saya lebih focus pada peran pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH), bukan pada keberadaan PKH itu sendiri. Akan tetapi penelitian saya bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pendamping dalam pendampingan PKH terhadap keluarga miskin, lalu bagaimana dalam pelaksanaannya dan apa hasil dari peran pendamping ini terhadap KPM PKH di Desa Sinargalih.

2. Landasan Teori

Peran

Dalam KBBI secara harfiah kata peran diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas (1966:7) dalam buku Edy Suhardono mengungkapkan bahwa teori peran sama seperti “peran ini dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap script (skenario), intruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku, pendapat dan reaksi umum penonton, serta dipenagurhi bakat pribadi si pelaku, seorang pelaku peran dalam kehidupan sosial pun mengalami hal yang hampir sama. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori peran memahami bagaimana individu memainkan peran dalam

masyarakat sesuai dengan harapan sosial yang terkait dengan posisi dan status mereka. Analogi dengan dunia teater memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana individu memainkan peran dalam interaksi sosial. Teori peran memiliki dampak penting dalam memahami interaksi sosial dan dinamika masyarakat secara lebih mendalam.

Peristilahan dalam teori peran dapat diuraikan menjadi empat kelompok berdasarkan Biddle & Thomas (2017:215). Kelompok-kelompok ini mencakup; (a) orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, ini melibatkan individu-individu yang berpartisipasi dalam situasi interaksi sosial. Setiap individu memainkan peran tertentu dalam interaksi tersebut. (b) perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kelompok ini mencakup perilaku konkret atau tindakan yang dilakukan oleh individu dalam konteks interaksi sosial. Perilaku ini mencerminkan bagaimana individu berperan dalam situasi tertentu. (c) kedudukan orang-orang dalam perilaku, ini mengacu pada posisi atau status yang dimiliki oleh individu dalam interaksi sosial. Kedudukan ini berkontribusi pada bagaimana individu memainkan peran dan berinteraksi dengan orang lain. (d) kaitan dan perilaku: kelompok ini melibatkan keterkaitan dan hubungan antara individu-individu dalam interaksi sosial. Interaksi ini memengaruhi bagaimana individu memainkan peran dan berperilaku.

Selain itu, menurut Sarwono (2014:215), teori peran (Role Theory) merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu,

termasuk psikologi, sosiologi, dan antropologi. Teori peran dipergunakan untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat dan memainkan peran-peran tertentu. Analogi dengan dunia teater digunakan untuk menjelaskan bahwa individu, seperti seorang aktor, harus memainkan peran tertentu dalam situasi tertentu sesuai dengan posisinya, dan ini memengaruhi perilaku dan interaksi mereka dalam kehidupan sosial.

Dengan demikian, peristilahan dalam teori peran mencakup aspek-aspek penting yang berkaitan dengan partisipasi individu dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul, kedudukan dan status individu, serta kaitan dan hubungan antara individu-individu tersebut. Teori peran sendiri merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu dan memberikan wawasan tentang bagaimana individu memainkan peran dalam konteks sosialnya.

3. Landasan Konseptual

a. Pendampingan

Pendampingan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping sosial dalam berbagai program. Fasilitator memiliki peran sebagai pendorong, penggerak, serta motivator bagi masyarakat, sementara masyarakat menjadi pelaku utama dan pengelola kegiatan. Pendampingan digunakan sebagai strategi umum oleh pemerintah dan Lembaga dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas SDM dengan hasilnya yang

mencakup kemampuan untuk mengenali diri sebagai bagian dari masalah yang dihadapi dan berusaha mencari alternatif pemecahan masalah.

Pendampingan juga berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat. SDM memiliki peran krusial dalam menentukan kemampuan individu. Karena itu, pendekatan pemberdayaan sangatlah penting dalam setiap kegiatan pendampingan. Suharto (2005, hlm 93) menyatakan bahwa pendampingan merupakan strategi yang berperan besar dalam kesuksesan program pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini juga ditegaskan dalam kutipan Payne (1986), yang menekankan bahwa pendampingan lebih fokus pada “making the best of the client’s resources”.

Secara sederhana, bahwa pendampingan merupakan suatu cara untuk mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai program. Fasilitator atau pendamping sosial berperan dalam menggerakkan dan membantu masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki, sehingga mereka dapat mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi dengan lebih efektif.

Pemberdayaan masyarakat merujuk pada serangkaian tindakan sosial, di mana anggota suatu komunitas mengatur diri mereka sendiri untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan kolektif guna mengatasi konflik sosial atau memenuhi kebutuhan

sosial, dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Namun, proses ini tidak selalu terjadi secara spontan, sering kali, ia berkembang melalui interaksi antara komunitas lokal dan berbagai pihak eksternal, termasuk pekerja sosial, baik yang mendorongnya melalui dorongan kemanusiaan maupun pendekatan profesional. Dalam konteks ini, pekerja sosial berperan sebagai pendamping sosial.

Pendampingan sosial merupakan sebuah strategi yang sangat menentukan keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”. Partisipasi aktif masyarakat menjadi fokus utama, dan dalam konteks ini, peran pekerja sosial seringkali mengambil bentuk pendamping, bukan sebagai penyembuh langsung atau pemecah masalah (problem solver) (Suharto, 2009). Dengan kata lain, pendampingan sosial merupakan pendekatan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola upaya pemberdayaan mereka sendiri. Pendamping sosial berperan sebagai fasilitator dan pendorong, membantu masyarakat untuk mengidentifikasi solusi berdasarkan sumber daya yang ada dan memainkan peran penting dalam membantu masyarakat untuk memahami potensi dan kekuatan mereka sendiri dalam mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi.

Metode pendampingan merupakan pendekatan yang banyak digunakan dalam berbagai program lembaga swadaya masyarakat (LSM), disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari kelompok sasaran yang sedang dihadapi. Peran pendamping sangatlah krusial, terutama dalam membina dan mengarahkan kegiatan kelompok sasaran. Seorang pendamping memiliki tugas-tugas penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi proses pembentukan serta pelaksanaan kegiatan kelompok. Pendamping berperan sebagai:

- 1) Fasilitator (Pemandu): Pendamping membantu memfasilitasi berbagai tahapan dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatan kelompok. Mereka membantu memudahkan alur proses, mendorong diskusi, serta memastikan kelancaran pelaksanaan rencana kegiatan.
- 2) Komunikator (Penghubung): Pendamping berperan sebagai penghubung antara kelompok sasaran dengan berbagai pihak terkait, seperti LSM, pemerintah, atau masyarakat luas. Mereka membantu menyampaikan informasi, memfasilitasi komunikasi, dan menjembatani hubungan antara kelompok dan lingkungannya.
- 3) Dinamisator atau Penggerak: Pendamping memiliki peran penting dalam memotivasi dan mendorong kelompok sasaran untuk aktif dan proaktif dalam melaksanakan kegiatan. Mereka dapat memberikan dorongan, inspirasi,

dan energi positif agar kelompok tetap termotivasi dan bersemangat.

Dr. Zubaedi, M.Ag. (2007) mengungkapkan pentingnya peran pendamping dalam memberikan arahan dan dukungan kepada kelompok sasaran. Pendamping bukan hanya sekadar pelaksanaan tugas teknis, tetapi juga menjadi fasilitator dalam mengembangkan kemampuan, mengoordinasikan interaksi, serta menggerakkan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Secara keseluruhan, metode pendampingan dalam program LSM memiliki tujuan untuk memaksimalkan potensi kelompok sasaran, meningkatkan partisipasi aktif mereka, dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Dengan pendampingan yang efektif, kelompok sasaran dapat merasa didukung, termotivasi, dan lebih mampu mengatasi tantangan yang dihadapi.

Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping PKH memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan program. Mereka adalah SDM yang direkrut dan dikontrak oleh Kementerian Sosial untuk melaksanakan tugas pendampingan di tingkat Kecamatan. Peran pendamping PKH memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi pemberdayaan masyarakat miskin (RTSM) yang merupakan bagian dari PKH.

Menurut Departemen Sosial (2009), pendampingan sosial adalah suatu proses relasi sosial antara pendamping dan klien yang

bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mengoptimalkan sumber daya dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Dengan demikian, pendamping PKH memiliki tanggung jawab untuk memecahkan masalah, menguatkan dukungan, mengoptimalkan sumber daya dan potensi dan meningkatkan akses terhadap layanan. Dengan adanya pendamping PKH yang efektif, diharapkan keluarga penerima manfaat PKH dapat lebih mandiri, terampil, dan mampu mengatasi tantangan ekonomi serta sosial yang dihadapi, sejalan dengan tujuan pemberdayaan yang diinginkan oleh program PKH.

Beberapa Undang-Undang yang mengakui peran pekerja sosial dalam penanganan persoalan sosial dan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Pada Pasal 1 angka 4, dinyatakan bahwa pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi serta profesi pekerjaan sosial. Mereka memiliki kepedulian pada pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman praktik pekerjaan sosial. Tugas-

tugas pekerja sosial meliputi pelayanan dan penanganan persoalan sosial.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Pada Pasal 1 ayat (14), "pendamping" diartikan sebagai pekerja sosial yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya. Ini mengakui bahwa pendamping dalam konteks perlindungan anak harus memiliki kompetensi profesional di bidang pekerjaan sosial.

Selain Undang-Undang, Keputusan Menteri Sosial No. 10/HUK/2007 juga mengakui dan mendefinisikan pekerja sosial. Dengan demikian, eksistensi pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan pada pemberdayaan masyarakat miskin melalui PKH didasarkan pada pengakuan dan regulasi yang diatur dalam UU serta keputusan resmi pemerintah.

b. Program Keluarga Harapan

PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan tujuan utama untuk meningkatkan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Keluarga penerima manfaat PKH diwajibkan memenuhi beberapa kondisi, terutama terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM di keluarga tersebut. Salah satu tujuan utama PKH adalah meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan

sosial. Dengan bantuan dari PKH, diharapkan keluarga dapat lebih mudah mengakses layanan-layanan tersebut. PKH tidak hanya memberikan solusi dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, diharapkan keluarga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan adanya bantuan dari PKH dan peningkatan akses pelayanan, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas diri mereka secara holistik, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Dapat disimpulkan PKH memiliki peran penting dalam membantu keluarga miskin mengatasi tantangan ekonomi dan sosial serta sebagai jalan mereka dalam meningkatkan kualitas hidup.

Definisi keluarga sangat miskin menurut Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku adalah sebuah rumah tangga yang memiliki kondisi kehidupan yang sangat minim dan terbatas, di mana sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar konsumsi makanan pokok saja. Keluarga ini umumnya tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan kecuali melalui fasilitas pemerintah seperti puskesmas atau fasilitas

kesehatan yang disubsidi. Selain itu, keluarga ini tidak mampu membeli pakaian secara rutin, bahkan hanya mampu melakukannya satu kali dalam setahun. Keterbatasan finansial juga mengakibatkan mereka tidak atau hanya dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SLTP) saja. Keluarga dalam kondisi sangat miskin ini menghadapi tantangan ekonomi yang serius dan memerlukan dukungan serta bantuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

PKH merupakan program lintas Kementerian dan Lembaga, karena actor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Program Keluarga Harapan adalah:

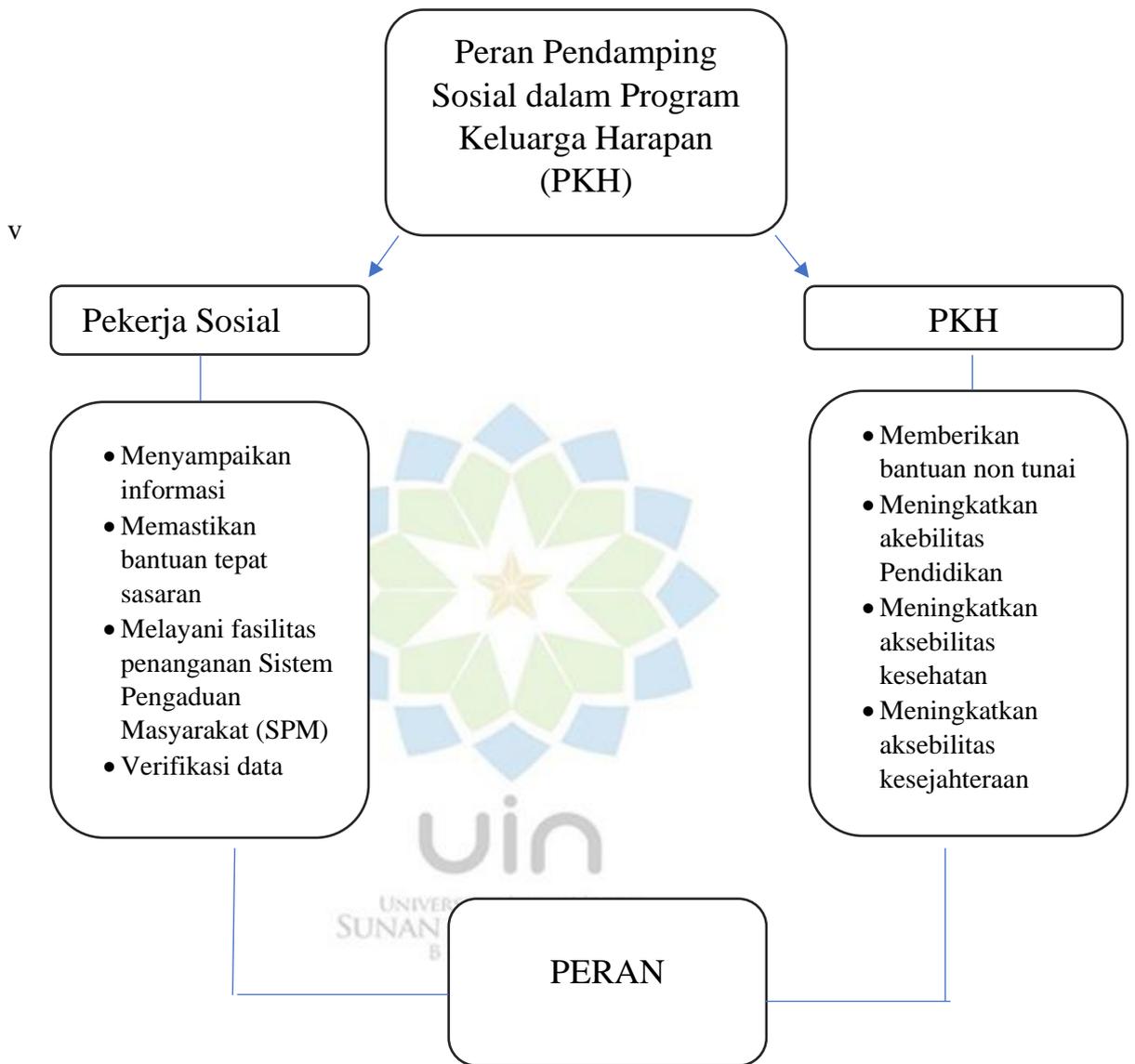
- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449)
- 6) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
- 7) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86)

- 8) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).
- 9) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125)
- 10) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705)
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147).

4. Kerangka Konseptual



F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sinargalih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Alasan mengambil lokasi ini karena penulis tertarik dengan program PKH yang berjalan di Desa

Sinargalih. Melihat dari banyaknya penerima manfaat PKH, sehingga menggugahkan rasa ingin tahu peneliti tentang peran pekerja sosial atau pendamping sosial dalam membantu mewujudkan harapan dari program yang telah di keluarkan oleh pemerintah dan peran pendamping sebagai penyampaian aspirasi masyarakat.

2. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan konstruktivisme dalam konteks ini merujuk pada pandangan bahwa realitas adalah sesuatu yang relatif, bergantung pada pengalaman yang dialami oleh subjek, dan dapat diinterpretasikan secara berbeda (Adi, et al., 2016:83). Dalam pendekatan kualitatif, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang mencerminkan pandangan, perilaku, dan pengamatan individu atau kelompok (Taylor, seperti dikutip oleh Lexsi J. Moleong).

Pemilihan pendekatan kualitatif dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara mendalam, sehingga memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang aspek yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami lebih jauh peran pekerja sosial atau pendamping sosial dalam konteks Program Keluarga Harapan di Desa Sinargalih, termasuk dalam hal penyampaian aspirasi dan peran mereka dalam menjalankan program tersebut.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan memberikan gambaran rinci tentang individu atau kelompok tertentu terkait dengan keadaan dan gejala yang tengah terjadi. Dalam konteks ini, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dengan cermat bagaimana peran pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sinargalih, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka.

Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam tentang peran pendamping dalam konteks PKH. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan data yang berupa kata-kata, narasi, dan pengalaman langsung dari para subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan dengan teliti dan mendalam tentang peran pendamping dalam mendukung pelaksanaan PKH di Desa Sinargalih.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merujuk pada pandangan Bodgan & Biklen, S. (1992) dalam Pupu, S. (2009:2), bahwa data kualitatif merujuk pada data yang terdiri dari ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk memahami fenomena yang sedang diteliti melalui pendekatan deskriptif dan analisis mendalam terhadap data-data tersebut.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah hasil dari penelitian langsung yang dilakukan penulis dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai peran pekerja sosial lebih tepatnya peran pendamping PKH dengan cara wawancara kepada yang bersangkutan. Selain itu juga mencari informasi dengan meminta tanggapan atau opini dari keluarga penerima manfaat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti penelitian terdahulu, artikel, buku, jurnal, dan skripsi. Dengan

menggunakan data sekunder, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang topik yang diteliti, serta dapat membandingkan dan mengintegrasikan hasil penelitian sebelumnya dengan temuan baru yang ditemukan dalam penelitian yang sedang berlangsung.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat kejadian yang terjadi. Dengan metode ini peneliti mengamati apa yang terjadi pada masyarakat di Desa Sinargalih Kec. Lemahsugih Kab. Majalengka. Serta untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti mengamati segala sesuatu yang berhubungan dengan program PKH dan keluarga penerima manfaat bantuan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab antar dua orang atau lebih yang dilakukan dengan verbal dan topik obrolan ini diarahkan pada suatu permasalahan tertentu (Saidah, 2015). Dalam proses penelitian ini, peneliti

melakukan wawancara kepada Ibu Apong sebagai penerima manfaat bantuan dan Ibu Fitri sebagai pihak pendamping dan beberapa aparat Desa lainnya mengenai PKH ini.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi digunakan untuk melengkapi atau mendukung data wawancara dan observasi. Dan data yang diperoleh ini bisa bersumber dari majalah, artikel, buku dan lain sebagainya.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, terutama dalam menganalisis dan menggeneralisasikan data secara cermat sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Dimana analisis ini sebagai upaya untuk mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, serta yang lainnya untuk menambah uraian peneliti tentang permasalahan yang diteliti dalam menyajikan hasil penemuannya. Untuk menemukan uraian tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari maknanya. Penelitian ini menggunakan tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Suharto, 2009) sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap yang dapat dilakukan setelah data terkumpul. Peneliti memilih data yang relevan dengan

kasus yang diambil. Jadi dengan beberapa informasi yang di dapat baik itu dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data lainnya, peneliti meringkas dan memilah kembali informasi yang didapat untuk dijadikan penunjang maupun pendukung terhadap keberlangsungan penelitian.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti merancang penyajian data berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar grafik atau tabel. Penyajian data ini bertujuan untuk menyatukan informasi sehingga nantinya dapat menggambarkan keadaan yang terjadi

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan yang dilakukan adalah ketika semua data terkumpul serta sudah mencakup informasi penting yang telah didapatkan dalam penelitian. Setelah semua data terkumpul dan lengkap maka akan menghasilkan sebuah kesimpulan akhir.